

Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan

Arnold Setiawan, dan Heru Purwadio

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia

e-mail: heru@urplan.its.ac.id

Abstrak—Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan sangat pesat. Di satu sisi perkembangan perkebunan kelapa sawit berdampak positif bagi pendapatan daerah, di sisi lain mengancam ketahanan pangan dengan berkembangnya trend alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan. Tujuan penelitian adalah mendapatkan arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit. penelitian ini menggunakan dua tahap analisa. Analisa tahap pertama dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dan expert judgement, sedangkan analisa tahap kedua untuk merumuskan arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan dengan metode deskriptif kualitatif dan expert judgement.

Alih fungsi lahan pertanian pangan dipengaruhi oleh faktor nilai sewa tanah, peraturan, biaya produksi, harga jual hasil panen, resiko usaha tani, ketersediaan air, teknik budidaya, dan harga lahan. Arahan pengendalian dari faktor nilai sewa tanah adalah dengan keringanan pajak lahan pertanian pangan dan retribusi hasil produksi perkebunan kelapa sawit. Arahan pengendalian dari faktor peraturan adalah dengan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui rencana tata ruang dan penegasan sanksi bagi pelanggar. Arahan pengendalian dari faktor biaya produksi adalah dengan memberikan bantuan sarana produksi bagi petani tanaman pangan. Arahan pengendalian dari faktor harga jual hasil panen adalah dengan jaminan harga jual hasil pertanian pangan yang menguntungkan. Arahan dari faktor resiko usaha tani adalah dengan penerapan pembasmian hama terpadu. Arahan pengendalian dari faktor ketersediaan air adalah dengan mengembangkan dan merawat saluran irigasi. Arahan pengendalian dari faktor teknik budidaya adalah dengan diversifikasi pertanian. Arahan pengendalian dari faktor harga lahan adalah dengan memperketat perizinan perkebunan kelapa sawit.

Kata Kunci—alih fungsi lahan, kelapa sawit, pengendalian pertanian pangan.

I. PENDAHULUAN

KABUPATEN Katingan merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang terkena dampak perluasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Pemerintah kabupaten mengkhawatirkan tindakan itu akan sangat memengaruhi ketahanan pangan daerah. Luas lahan pertanian di Katingan dari tahun ke tahun terus menyusut. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini akan mengancam ketahanan pangan (Borneonews, 14 Mei 2011).

Bagi daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif masih rendah, ada kecenderungan pemerintah daerah menganggap urgensi alih fungsi lahan pertanian pangan

masih rendah. Hal ini berkaitan dengan potensi lahan untuk pembukaan lahan pertanian baru (Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2006). Hal ini juga berlaku di Kabupaten Katingan. Selama ini perhatian pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan terlalu dipusatkan pada satu kawasan pertanian pangan saja. Luas lahan sawah beririgasi teknis di kawasan pertanian pangan Kecamatan Katingan Kuala pada tahun 2005 seluas 14412 ha. Pada tahun 2006 menyusut menjadi 12121 ha. Pada tahun 2007 melalui program pemerintah luas lahan padi meningkat menjadi 15303 ha hingga pada tahun 2008 menjadi 16184 ha. pada tahun 2010 luas lahan 15208 ha dan pada tahun 2012 menjadi 16716 ha (Dinas Pertanian Kab. Katingan, 2012). Penelitian ini mengambil lokasi di bagian tengah Kabupaten Katingan, yang merupakan pemasok produksi pangan selain Kecamatan Katingan Kuala. Pada wilayah penelitian, lahan pertanian pangan yang merupakan lahan nonirigasi teknis terus mengalami alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi lahan pertanian pangan ini berakibat pada berkurangnya produksi pangan daerah. Pada tahun 2012 produksi beras Kabupaten Katingan sebesar 35.510 ton. Hasil produksi ini melebihi perkiraan kebutuhan beras Kabupaten Katingan yaitu 19.800 ton (BPS Kab. Katingan, 2012). Kelebihan produksi beras disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan provinsi. Pada saat ini produksi beras Kabupaten Katingan mampu mencukupi kebutuhan beras daerah dan berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan beras provinsi, tetapi seiring bertambahnya penduduk dan berkurangnya luas lahan pertanian pangan akan menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan di masa mendatang. Berkurangnya luas lahan pertanian pangan akibat beralihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit berdampak pada berkurangnya hasil produksi pangan daerah terutama beras. Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk 3,2% per tahun (Katingan Dalam Angka, 2012), maka kebutuhan beras juga diproyeksikan meningkat 3,2% per tahun. Di lain pihak berkurangnya lahan pertanian pangan di wilayah penelitian dengan rata-rata 535 Ha per tahun yang produktivitasnya 2,6 ton/Ha akan mengakibatkan produksi beras berkurang sebesar 1445 ton per tahunnya (Dinas Pertanian Kab. Katingan, 2012). Jika hal ini terus berlanjut, maka dalam 8 tahun kedepan produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan daerah.

Kedepan untuk bertahan sebagai kabupaten dengan surplus produksi padi di Provinsi Kalimantan Tengah, kabupaten ini dihadapkan pada masalah tingginya animo petani terhadap kelapa sawit yang realisasinya dilakukan dengan cara menjadikan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit. Bila tidak ada perbaikan teknik budidaya

(teknologi) dan pencetakan areal tanam yang baru yang mampu mengkompensasi kehilangan hasil akibat alih fungsi tersebut, total produksi padi Kabupaten Katingan akan berkurang yang juga berarti kontribusinya terhadap total produksi padi Provinsi Kalimantan Tengah juga akan berkurang. Salah satu dampak konversi lahan pertanian padi yang sering menjadi sorotan masyarakat luas adalah terganggunya ketahanan pangan. Masalah yang ditimbulkan bersifat permanen atau tetap akan terasa dalam jangka panjang meskipun alih fungsi lahan sudah tidak terjadi lagi (Irawan, 2005). Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terkendali, pengambil kebijakan harus memiliki data dan informasi yang memadai terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi petani melakukan alih fungsi lahan.

Oleh karena itu, diketahuinya faktor-faktor penyebab berserta persepsi dan motivasi petani yang telah dan akan mengalihkan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit adalah perlu seperti yang akan diuraikan dalam tulisan ini dan seterusnya dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah atau mengambil kebijakan dalam hubungannya dengan upaya tetap mempertahankan produksi padi Kabupaten Katingan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan model penelitian studi kasus (*case study*). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

A. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang diterapkan adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

1. Pengumpulan Data

Responden untuk pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah stakeholder-stakeholder utama yang memiliki kepentingan serta pengaruh dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan di kawasan Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Sanaman Mantikei. Penentuan responden ini berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap arahan pengendalian konversi lahan pertanian di daerah tersebut. Selanjutnya akan diperoleh stakeholder utama yang berpengaruh dan mempunyai kepentingan dalam bidang ini, kemudian dapat melakukan analisis ke tahap selanjutnya dengan melakukan wawancara.

Analisis stakeholder ini bertujuan untuk mendapatkan responden dan penentuan sampel yang akan diteliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang akan digunakan untuk memperoleh pihak mana saja yang terlibat, berpengaruh, dan berkepentingan dalam pengendalian konversi lahan pertanian di kawasan Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Sanaman Mantikei. Stakeholders yang terlibat dalam penelitian ini adalah stakeholders untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan analisis expert judgement.

B. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan dua tahap analisa. Analisa tahap pertama dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan

menjadi perkebunan kelapa sawit di Kab. Katingan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan expert judgement. Analisa deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan membandingkan kondisi eksisting di lapangan dengan teori pada tinjauan pustaka. Faktor –faktor yang didapat dari analisa deskriptif kualitatif kemudian divalidasi dengan meminta pendapat para pakar melalui analisa expert judgement. Analisa tahap kedua dilakukan untuk mendapatkan arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan expert judgement. Hasil dari analisa tahap kedua adalah arahan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ditinjau dari setiap faktor yang didapatkan pada analisa tahap pertama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan antara teori dan literatur dengan kondisi existing di wilayah penelitian. Hasil analisa deskriptif faktor-faktor adalah : 1. Nilai sewa tanah, 2. Peraturan, 3. Biaya produksi, 4. Nilai agunan, 5. Harga jual hasil panen, 6. Resiko usaha tani, 7. Ketersediaan air, 8. Teknik bertani, 9. Usia tanaman, 10. Proses pascapanen, 11. Kesesuaian lahan, dan 12. Harga lahan

Hasil analisa deskriptif divalidasi dengan menggunakan analisa expert judgement. Dari hasil analisa expert judgement didapat faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit adalah : 1. Nilai sewa tanah, 2. Peraturan, 3. Biaya produksi, 4. Nilai agunan, 5. Harga jual hasil panen, 6. Resiko usaha tani, 7. Ketersediaan air, 8. Teknik bertani, 9. Proses pascapanen, 10. Harga lahan

B. Analisis Perumusan Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan

Perumusan arahan pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Gresik dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan dengan teori dan literatur pendukung. Hasilnya adalah :

1. Arahan pengendalian dari faktor nilai sewa tanah adalah
 - a) Insentif berupa pajak lahan pertanian pangan yang rendah kepada petani yang mempertahankan fungsi lahan pertanian pangan,
 - b) Retribusi produk perkebunan kelapa sawit. retribusi ini kemudian digunakan sebagai salah satu sumber insentif kepada petani pangan
2. Arahan Pengendalian dari faktor peraturan adalah a) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diperkuat dengan peraturan daerah. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan didasarkan pada

- kesesuaian lahan, b) Penegasan pemberlakuan sanksi bagi pelanggar peraturan pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Arahan Pengendalian dari faktor biaya produksi adalah a) Bantuan unit produksi pertanian seperti bibit unggul, pupuk, pestisida, dan pengadaan lantai jemur kepada petani tanaman pangan, b) Pemberdayaan pertanian kolektif dengan sistem bertani kelompok untuk menekan biaya tenaga kerja pertanian tanaman pangan yang melonjak pada masa panen.
 4. Arahan pengendalian dari faktor nilai agunan adalah a) Pembentukan lembaga pembiayaan mikro pertanian, b) Kemudahan persyaratan pengajuan kredit
 5. Arahan pengendalian dari faktor harga jual hasil panen adalah a) Penetapan harga dasar produk pertanian pangan, b) Pengutamakan produk lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah, c) Pembelian hasil panen pertanian pangan oleh pemerintah daerah.
 6. Arahan pengendalian dari faktor resiko usaha tani adalah a) Pemanfaatan predator alami untuk mengatasi hama tikus, b) Pemberantasan hama tikus melalui Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT)
 7. Arahan Pengendalian dari faktor ketersediaan air adalah a) Pengembangan dan perawatan saluran irigasi, b) Pengembangan sarana irigasi pada lahan dengan produktivitas tinggi dan sudah memiliki irigasi setengah teknis seperti di Kecamatan Tawang Sawangan, c) Pembangunan area penampung air agar dapat dimanfaatkan pada lahan pertanian pangan nonirigasi.
 8. Arahan Pengendalian dari faktor teknik bertani adalah a) Diversifikasi pertanian dengan sistem tumpang sari. Pada lahan pertanian ladang dapat diaplikasikan teknik bertani padi gogo-jagung-ubi kayu. Berdasarkan studi di daerah lain, sistem tumpang sari akan memberikan pendapatan yang lebih baik bagi petani.
 9. Arahan Pengendalian dari faktor proses pascapanen adalah a) Pemberdayaan kelompok tani untuk mengelola kegiatan pascapanen hingga tahap penggilingan agar tidak ada lagi petani yang menjual gabah hasil panen secara langsung.
 10. Arahan Pengendalian dari faktor harga lahan adalah a) Memperketat izin perkebunan sawit, b) Penyuluhan pentingnya lahan pertanian pangan terhadap ketahanan pangan daerah

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan adalah nilai sewa tanah, peraturan, biaya produksi, nilai agunan, harga jual hasil panen, resiko usaha tani, ketersediaan air, teknik bertani, proses pascapanen, dan harga lahan.

2. Arahan pengendalian dari faktor nilai sewa tanah adalah dengan keringanan pajak lahan pertanian pangan dan retribusi hasil produksi perkebunan kelapa sawit. Arahan pengendalian dari faktor peraturan adalah dengan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui rencana tata ruang dan penegasan sanksi bagi pelanggar. Arahan pengendalian dari faktor biaya produksi adalah dengan memberikan bantuan sarana produksi bagi petani tanaman pangan. Arahan pengendalian dari faktor harga jual hasil panen adalah dengan jaminan harga jual hasil pertanian pangan yang menguntungkan. Arahan dari faktor resiko usaha tani adalah dengan penerapan pembasmian hama terpadu. Arahan pengendalian dari faktor ketersediaan air adalah dengan mengembangkan dan merawat saluran irigasi. Arahan pengendalian dari faktor teknik budidaya adalah dengan diversifikasi pertanian. Arahan pengendalian dari faktor harga lahan adalah dengan memperketat perizinan perkebunan kelapa sawit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Heru Purwadio, MSP., yang bersedia memberikan bimbingan dan banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih pula kepada pihak-pihak serta instansi terkait yang memberikan bantuan kemudahan dalam memperoleh data-data dalam penelitian serta kepada kedua orang tua, saudara-saudara, juga teman-teman yang selalu memotivasi dan banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bappenas. 2006. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Jakarta.
- [2] BPS. 2012. *Kabupaten Katingan Dalam Angka 2012*. Katingan : BPS Kabupaten Katingan.
- [3] Hariono. 2009. *Rancangan Penyuluhan Pengendalian Hama Tikus (*Rattus argentiventer*) Pada Tanaman (*Oryza sativa* L.) Dengan Menggunakan Rodentisida Nabati Buah Papaya Tua (*Carica papaya*), Kulit Gamal (*Gliricidia sepium*), dan Biji Jarak (*Ricinus communis*) di Desa Sukoderma Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur*. Malang: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.
- [4] Ilham, dkk, 2003. *Perkembangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*. IPB Press.
- [5] Iwan, Isa. (2006). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian (Multifunctionality and Revitalization of Agriculture), Balai Penelitian Tanah Badan Litbang Pertanian – Kementerian Pertanian – Republik Indonesia.
- [6] Kurdianto, D. 2011. *Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Tanaman Kelapa Sawit*. <http://uripsantoso.wordpress.com>
- [7] Manan, H, 2006. *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Mewujudkan Lahan Pertanian Abadi Dalam Rangka Revitalisasi Pertanian*. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian. Makasar
- [8] Niin. 2010. *Dinamika Spasial Penggunaan Lahan Di Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*. Bogor : Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor